

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan indikator kinerja utama organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/m.pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 67).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
6. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja OPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran OPD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra OPD Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU pemerintah kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021.
13. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD Tahun 2016-2021.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan OPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten dengan IKU OPD harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*) ; dan

- b. IKU OPD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*ouput*).

#### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra OPD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan OPD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra OPD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dan OPD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.

- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 30-12-2016

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 30-12-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR 120

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
<b>1.1. Reformasi birokrasi cepat terwujud.</b>			
1.1.1.	Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.	1) % Tingkat kedisiplinan ASN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai tingkat kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat dan etos kerja ASN.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah ASN yang mentaati peraturan}}{\text{Jumlah ASN yang mendapatkan sanksi}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> BKPP Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BKPP Kabupaten Sragen.</li> </ul>
1.1.2.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	1) Opini BPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun bersangkutan.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> SETDA, Inspektorat, BAPPEDA LITBANG dan BPPKAD.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .</li> </ul>
		2) Nilai LkjIP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i>.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Laporan Hasil Penilaian LKjIP oleh Kementerian PAN dan RB.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB.</li> </ul>
		3) Tingkat maturitas SPIP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di tingkat perangkat daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat maturitas SPIP di Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Inspektorat .</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Inspektorat .</li> </ul>
1.1.3.	Peningkatan kompetensi dan integritas Aparat pengawasan.	1) Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Inspektorat.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Inspektorat.</li> </ul>
<b>1.2.</b>	<b>Kualitas pelayanan publik meningkat.</b>		
1.2.1.	Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat.	1) Nilai Rata-rata IKM pada PD yang memberikan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah OPD Pelayanan Publik yang nilai IKM nya Baik}}{\text{Jumlah OPD Pelayanan Publik}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> OPD Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Sragen.</li> </ul>
1.2.2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK.	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah OPD yang ada di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh OPD.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISKOMINFO.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISKOMINFO.</li> </ul>
		2) Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah OPD yang ada di Kabupaten Sragen yang telah menerapkan arsip secara baku, karena arsip merupakan bukti dari kegiatan dari OPD.</li> </ul>

		baku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan arsip baku}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif.         </li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b>            Dinas ARPUS.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas ARPUS.         </li> </ul>
<b>1.3.</b>	<b>Keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat.</b>		
1.3.1.	Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan.	1) Angka kriminalitas yang ditangani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih karena tindak kriminalitas merupakan salah satu bentuk dari ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan langkah nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sragen.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kriminalitas di Kabupaten Sragen yang ditangani}}{\text{Jumlah total kriminalitas}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif.         </li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b>            SATPOL PP dan Badan KESBANGPOL.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            SATPOL PP dan Badan KESBANGPOL.         </li> </ul>
<b>2.1.</b>	<b>Kualitas Jalan Jembatan, irigasi, drainase, sitem pengelolaan sampah dan air minum meningkat.</b>		
2.1.1.	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, saluran irigasi, drainase, sistem pengelolaan sampah, dan air minum.	1) % jembatan dalam kondisi baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif.         </li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b>            DPU PR.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            DPU PR.         </li> </ul>

		<p>2) % jalan dalam kondisi baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DPU PR.</li> </ul>
		<p>3) % Drainase dalam kondisi baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi drainase dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Drainase kondisi baik}}{\text{Drainase di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DPU PR.</li> </ul>
		<p>4) % saluran irigasi dalam kondisi baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi irigrasi dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Irigasi kondisi baik}}{\text{Irigasi di Kabupaten Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DPU PR.</li> </ul>

		<p>5) Persentase pemenuhan perlengkapan jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi pemenuhan perlengkapan jalan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat perlengkapan jalan sangat mendukung keselamatan dalam berlalulintas.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan dengan perlengkapan}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISHUB.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISHUB.</li> </ul>
		<p>6) % layanan akses air minum (perpipaan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air minum yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses air minum}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DPU PR.</li> </ul>
		<p>7) % sampah yang terangkut di wilayah pelayanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan dalam penyelesaian pelayanan masalah persampahan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah sampah yang terangkut}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DPU PR.</li> </ul>

2.2.	<b>Kualitas lingkungan, perumahan, permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat.</b>		
2.2.1.	Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.	1) Kesesuaian pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat, mengingat penataan ruang harus dilakukan sejak awal agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah wilayah yang pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\text{Jumlah wilayah pemanfaatan ruang}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DPU PR.</li> </ul>
2.2.2.	Peningkatan kualitas lingkungan.	1) % luas lahan kritis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau lahan kritis yang ada di Kabupaten Sragen, guna mengendalikan luasan lahan kritis agar tidak terus bertambah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Luas lahan kritis}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas LH.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas LH.</li> </ul>
		2) persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya melakukan pengendalian terhadap luas RTH di wilayah Perkotaan, mengingat kondisi saat ini terjadi penurunan persentase ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang sebenarnya cukup penting untuk menjaga kualitas lingkungan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah kota}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas LH.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas LH.</li> </ul>
		3) % Layanan akses sanitasi layak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan layanan air minum di daerah perkotaan, mengingat layanan air minum perkotaan masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas DPU PR.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas DPU PR.</li> </ul>
		4) % sampah yang terolah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan pengolahan sampah di Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah sampah yang terolah}}{\text{Jumlah sampah}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas LH.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas LH.</li> </ul>
2.2.3.	Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman.	1) % luas kawasan kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar luas kawasan kumuh, mengingat kawasan kumuh berbanding lurus dengan tingkat kesehatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPERKIM.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPERKIM.</li> </ul>

		2) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak rumah yang tidak layak huni, mengingat rumah tidak layak huni berbanding lurus dengan tingkat kesehatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah rumah di kab. Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPERKIM.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPERKIM.</li> </ul>
<b>2.3.</b>	<b>Kesiapsiagaan dan penanggulangan, serta penanganan korban bencana baik bencana alam, sosial maupun kebakaran meningkat.</b>		
2.3.1.	Peningkatan respon time penanganan korban bencana.	1) Tingkat waktu penanganan korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan pemerintah dalam penanganan korban bencana, hal ini menjadi tolok ukur kesiapsiagaan pemerintah terhadap penanganan korban bencana .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Tenggat waktu yang diperlukan dalam penanganan korban bencana.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> BPBD.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPBD.</li> </ul>
<b>3.1.</b>	<b>Produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan meningkat.</b>		
3.1.1	Peningkatan produksi dan Produktivitas pertanian.	1) Produk-tivitas tanaman utama (padi, jagung, kedelai).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai mengingat tanaman tersebut merupakan sumber pangan utama masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan pangan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah produksi tanaman pangan, pada tahun bersangkutan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPERTAN.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPERTAN.</li> </ul>
3.1.2	Peningkatan produksi peternakan.	1) Peningkatan produksi peternakan (daging, telur, populasi sapi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi peternakan daging, telur dan populasi sapi mengingat hasil produksi peternakan tersebut merupakan kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan produksi.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah produksi peternakan pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISNAKKAN.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISNAKKAN.</li> </ul>
3.1.3	Peningkatan produksi perikanan.	1) Produksi perikanan budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pengembangan perikanan tangkap terhadap jumlah produksi perikanan budidaya. Hal ini penting, mengingat Kabupaten Sragen memiliki potensi perikanan budidaya yang bisa dioptimalkan potensinya demi mendukung kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berjalan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISNAKKAN.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISNAKKAN.</li> </ul>
		2) Produksi perikanan perairan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pengembangan perikanan perairan umum terhadap jumlah produksi perikanan. Hal ini penting demi mendukung kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah produksi perikanan perairan umum pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISNAKKAN.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISNAKKAN.</li> </ul>
<b>3.2.</b>	<b>Keanekaragaman pangan meningkat.</b>		
3.2.1.	Peningkatan keanekaragaman pangan.	1) Skor Pola Pangan Harapan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor PPH.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas KETAPANG.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas KETAPANG.</li> </ul>
<b>3.3.</b>	<b>Daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi serta mengembangkan potensi perindustrian dan perdagangan meningkat.</b>		
3.3.1.	Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM.	1) % koperasi sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak koperasi sehat dibanding jumlah koperasi kabupaten secara keseluruhan di Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi di Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DINKOP UKM.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DINKOP UKM.</li> </ul>
		2) % meningkatnya usaha mikro menjadi kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil dibanding jumlah seluruh usaha mikro di Kabupaten secara keseluruhan di Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang berkembang}}{\text{Jumlah seluruh usaha mikro di}} \times 100\%</math></li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DINKOP UKM</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DINKOP UKM</li> </ul>
3.3.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daerah, inovasi daerah.	1) % Desa Inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak desa yang memiliki inovasi di Kabupaten Sragen, mengingat inovasi merupakan salah satu kunci penyelesaian masalah di desa.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa inovasi}}{\text{Jumlah seluruh desa di Sragen}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> BAPPEDA LITBANG.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BAPPEDA LITBANG.</li> </ul>
3.2.4.	Pengembangan nilai perdagangan dan perindustrian.	1) Nilai ekspor perdagangan (US\$).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kenaikan nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Sragen, mengingat nilai ekspor bersih perdagangan mempengaruhi neraca perdagangan di Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Nilai ekspor perdagangan tahun berjalan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPERINDAG.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPERINDAG.</li> </ul>
		2) % kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ADHB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa banyak pertumbuhan industri pengolahan di Sragen, mengingat dalam rangka peningkatan produksi daerah industri pengolahan perlu didorong untuk terus tumbuh.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB ADHB}} \times 100\%</math></li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPERINDAG.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPERINDAG.</li> </ul>
<b>3.4.</b>	<b>Kualitas destinasi pariwisata meningkat.</b>		
3.4.1	Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah.	1) Jumlah kunjungan Wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk menilai peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata, wisata minat khusus, event dan lain-lain pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPORA.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPORA.</li> </ul>
<b>3.5.</b>	<b>Investasi dan mempermudah perijinan serta menyiapkan kualitas tenaga kerja meningkat.</b>		
3.5.1.	Peningkatan nilai dan jumlah investasi.	1) Nilai Investasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Sragen, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah nilai investasi pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas PM PTSP.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas PM PTSP.</li> </ul>
3.5.2.	Pengurangan pengangguran.	1) Tingkat Pengangguran Terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Sragen prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISNAKER.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISNAKER.</li> </ul>
<b>4.1.</b>	<b>Mutu dan akses pendidikan baik PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta minat baca masyarakat meningkat.</b>		
4.1.1.	Peningkatan penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar.	1) Angka Harapan Sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar di Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah anak sekolah}}{\text{Jumlah anak usia sekolah}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISDIKBUD.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISDIKBUD.</li> </ul>
4.1.2.	Peningkatan minat baca masyarakat.	1) % pertumbuhan pengunjung perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan jumlah pengunjung/pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen dalam satu tahun, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan minat baca masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pengunjung/pemustaka Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas ARPUS.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas ARPUS.</li> </ul>
<b>4.2.</b>	<b>Potensi pemuda dalam olah raga berkembang.</b>		
4.2.1.	Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga.	1) Jumlah medali olah raga yang di terima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan prestasi atlet-atlet di Kabupaten Sragen, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan daya saing</li> </ul>

			<p>disemua cabang olahraga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah medali yang diperoleh pada tahun berjalan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPORA.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPORA.</li> </ul>
		2) Jumlah pemuda prestasi di lingkup provinsi maupun nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan pemuda yang berprestasi tingkat provinsi maupun nasional di segala bidang di Kabupaten Sragen, hal ini sebagai tolok ukur daya saing pemuda di Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pemuda yang berprestasi pada tahun berjalan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISPORA.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISPORA.</li> </ul>
<b>4.3.</b>	<b>Pertumbuhan penduduk terkendali.</b>		
4.3.1.	Pengendalian pertumbuhan penduduk.	1) Laju pertumbuhan penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah penduduk tahun berjalan}}{\text{Jumlah penduduk tahun lalu}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas PPKB PPPA.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas PPKB PPPA.</li> </ul>
<b>4.4.</b>	<b>Derajat kesehatan masyarakat meningkat.</b>		
4.4.1.	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1) Angka Kematian Ibu .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, mengingat setiap kehamilan beresiko dan pembangunan kesehatan di</li> </ul>

			<p>Sragen prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun}} \times 100.000</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif.         </li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b>            DINKES.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            DINKES.         </li> </ul>
		2) Angka Kematian Bayi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Sragen prioritasnya diarahkan pada kesehatan ibu, bayi, balita.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun}} \times 100.000</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif.         </li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b>            DINKES.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            DINKES.         </li> </ul>
		3) % Gizi Buruk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator prevalensi gizi buruk pada balita merupakan <i>output</i> utama dari upaya intervensi asupan gizi dan pola asuh gizi keluarga. Dalam indikator ini tercakup aspek kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) sebagai nutrisi pendukung pertumbuhan. Indikator ini dianggap penting untuk mengevaluasi dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk pada balita di masyarakat.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penyandang gizi buruk}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten Sragen}} \times 100\%</math> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DINKES.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DINKES.</li> </ul>
<b>4.5.</b>	<b>Penanganan penyadang masalah kesejahteraan sosial meningkat.</b>		
4.5.1.	Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS.	1) % PMKS yang ditangani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini untuk mengetahui jumlah PMKS di Sragen yang tertangani pada tahun bersangkutan, mengingat di Sragen masih banyak PMKS yang perlu mendapatkan penanganan sosial.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah total PMKS}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DINSOS.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DINSOS.</li> </ul>
<b>4.6.</b>	<b>Kelestarian budaya dan nilai nilai kearifan lokal meningkat.</b>		
4.6.1.	Peningkatan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan.	1) % cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk menilai peran serta upaya pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> DISDIKBUD.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> DISDIKBUD .</li> </ul>
<b>5.1</b>	<b>Keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan meningkat.</b>		
5.1.1	Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan .	1) Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan (desa swasembada).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini untuk mengetahui tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa, karena desa merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tingkat paling bawah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa swasembada}}{\text{Jumlah desa di Sragen}} \times 100\%</math></li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas PMD.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas PMD.</li> </ul>
<b>5.2.</b>	<b>Kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan meningkat.</b>		
5.2.1.	Peningkatan penanganan kekerasan anak dan perempuan.	1) Rasio KDRT Perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merupakan indikator penting guna meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas PPKB PPPA.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas PPKB PPPA.</li> </ul>
		2) Rasio KDRT Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merupakan indikator penting guna meningkatkan pelayanan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM bidang layanan terpadu bagi anak korban kekerasan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah KDRT anak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif.</li> <li>• <b>OPD Penanggungjawab :</b> Dinas PPKB PPPA.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas PPKB PPPA.</li> </ul>

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI